

DAFTAR RUJUKAN

Buku

Arikunto, Suharsimi. 2014. *“Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek”*.

Jakarta: PT. Rineka cipta.

A. Suriyaman Mustari Pide. 2014. *“Hukum Adat. Dahulu, Kini, dan Akan Datang”*,

Jakarta: Prenada Media Group.

Darsana. 2010. *“Lembaga Perkreditan Desa Bali”*. Bali: Sinar Mas

Dendawijaya, Lukman. 2015. *“Manajemen Perbankan”*. Jakarta : Ghalia
Indonesia.

Djulaeka, Rahayu Sari. 2019. *“Buku Ajar Metode Penelitian Hukum”*. Scopindo
Media Pustaka.

Efendi, Jonaedi dan Johnny Ibrahim. 2018. *”Metode Penelitian Hukum Normatif
dan Empiris”*. Depok:Prenadamedia Grup.

Fajar, Mukti. Yulianto Achmad. 2010. *“Dualisme Penelitian Hukum Empiris &
Normatif”*. Pustaka Belajar. Yogyakarta.

Hariyani, Iswi. 2012. *”Restrukturisasi & Penghapusan Kredit Macet”*. Jakarta: PT.
Elex Media Komputindo.

Hermansyah. 2013. *”Hukum Perbankan Nasional Indonesia”*. Jakarta: Kencana.

Ishaq. 2017. *“Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta
Disertasi”*. Bandung: Alfabeta.

Kasmir. 2015. *“Analisis Laporan Keuangan”*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Kasmir. 2014. *“Bank & Lembaga Keuangan Lainnya”*. Jakarta: PT. Raja Grafindo
Persada.

- Mansyur, Ridwan dan Witanto. 2017. *“Gugatan Sederhana Teori, Praktik, dan Permasalahannya”*. Jakarta: Pustaka Dunia.
- Miru, Ahmad. 2016. *“Hukum Perjanjian & Perancangan Perjanjian”*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Muljadi, Kartini. Gunawan Widjaja. 2014 *“Perikatan yang Lahir dari Perjanjian”*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Nazir, Moh. 2014. *“Metode Penelitian”*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Nuradi. Edi Roheadi. 2021. *“Hukum Ketenagakerjaan”*. Bogor: PT. Mandala Nasional.
- Rivai, Veithzal. 2012. *“Islamic Financial Management”*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Pemerintah Provinsi Bali. 2010. *“Profile Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Daerah Bali Tahun 2009”*. Denpasar: Pemerintah Provinsi Bali.
- Sadiartha, Anak Agung Ngurah Gede. 2016. *“Hegemoni dan Kontra Hegemoni Pengelolaan Lembaga Perkreditan Desa”*. Denpasar: Universitas Hindu Indonesia (UNHI) Denpasar.
- Silondae, Arus Akbar dan Wirawan B.Ilyas. 2012. *“Pokok-pokok Hukum Bisnis”*. Jakarta: Salemba Empat.
- Simanjuntak, P.N. H. 2017. *“Hukum Perdata Indonesia Cetakan ke- 3”*. Jakarta: Kencana.
- Soekanto, Soerjono. 2013. *“Penelitian Hukum Normatif”*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Suadi, H. Amran. 2018. *“Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah: Penemuan dan Kaidah Hukum”*. Jakarta: Prenamedia Group.
- Subekti. 2019. *“Hukum Perjanjian”*. Jakarta : Citra Aditya Bhakti.

- Subekti dan Tjitrosoedibio. 2015. *“Kamus Hukum”*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Sudantra, Ketut dan A.A Gede Oka Perawata. 2010. *“Wicara Lan Pamidanda”*.
Bali: Lembaga Dokumentasi dan Publikasi Fakultas Hukum Universitas
Udayana.
- Sugiyono. 2015. *“Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)”*. Bandung:
Alfabeta.
- Sumarta I Ketut, 2014 *“Pararem Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Bali”*. Bali:
Majelis Desa Pakraman Bali, Denpasar.
- Syahmin. 2020. *“Hukum Perjanjian Internasional”*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Utama, I Gusti Bagus Rai. 2014. *“Pengantar Industri Pariwisata”*. Yogyakarta
Penerbit Deepublish
- Widjaja, Gunawan. 2014. *“Perikatan yang Lahir dari Perjanjian”*. Jakarta: PT.
Raja Grafindo Persada.
- Windia, Wayan P, dan I Ketut Sudantra. 2006. *“Pengantar Hukum Adat Bali”*. Bali:
Lembaga Dokumentasi dan Publikasi Fakultas Hukum Universitas
Udayana.
- Windia, Wayan P. 2008. *“Menyoal Awig-Awig Eksistensi Hukum Adat dan Desa di
Bali”*, Bali: Lembaga Dokumentasi dan Publikasi Fakultas Hukum
Universitas Udayana.
- Yahman. 2014. *“Karakteristik Wanprestasi & Tindak Pidana Penipuan”*. Jakarta:
Kencana.

Undang-Undang

- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah
Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3632).

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790).

Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan. (Penjelasan Atas Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 131).

Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM). (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5394).

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. (Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23).

Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 11 Tahun 2020 Tentang Pelarangan Sementara Orang Asing Masuk Wilayah Negara Republik Indonesia. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 305).

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa. (Lembaran Daerah Tahun 2017 Nomor 3)

Peraturan Gubernur Bali Nomor 44 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2017 Nomor 44).

Jurnal

Badan Pusat Statistik. 2021. "Perkembangan Triwulanan Ekonomi Bali Triwulan IV 2020".

Dewangker, A. E. P. 2020. "Penggunaan Klausula Force Majeure Dalam Kondisi Pandemi". *Jurnal Education and development*, 8(3).

- Dwinata, I Gede Made Gandhi, I Made Sarjana, dan Ni Putu Purwanti. 2015. “Eksistensi lembaga perkreditan desa setelah dikeluarkannya undang-undang nomor 1 tahun 2013 tentang lembaga keuangan mikro”. *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum*, 3(3), 2303-0569.
- Gni Wastu, Ida Bagus Gde, I Gusti Ngurah Wairocana, dan Desak Putu Dewi Kasih. 2017. “Kekuatan Hukum Perjanjian Kredit Di Bawah Tangan Pada Bank Perkreditan Rakyat”. *Acta Comitatus: Jurnal Hukum Kenotariatan*, 2(1).
- Hanim, Lathifah, dan Ms. Noorman. 2016. “Penyelesaian Perjanjian Kredit Bank Sebagai Akibat Force Majeure Karena Gempa Di Yogyakarta”, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 3(2).
- Herviani, Vina dan Angky Pebriansyah. 2016. “Tinjauan atas Proses penyusunan Laporan Keuangan Pada Young Entrepreneur Academy Indonesia Bandung”. *Jurnal Riset Akuntansi Universitas Komputer Indonesia*, 7(2).
- HFA Vollmar dalam Sinaga, N. A. 2021. “Perspektif Force Majeure Dan Rebus Sic Stantibus Dalam Sistem Hukum Indonesia”. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 11(1).
- Irlanda, Astrina Putri dan Kadek Januarsa Adi Sudharma. 2022. “Penyelesaian Sengketa Kredit Macet Akibat Debitur Wanprestasi Dalam Situasi Pandemi Covid-19 Pada Bpr Kita, Kuta-Badung”. *Jurnal Yustitia*, 8 (1),
- Jeddawi, Murtir dan Abdul Rahman. 2020. ”Identifikasi Hukum Adat Yang Masih Berlaku Dalam Penyelesaian Persoalan Sosial Di Desa Kawo Kabupaten Lombok Tengah”. *Jurnal Konstituen*, 2(2), 2656-0925.
- Malik, Farmawaty. 2016. “Peranan Kebudayaan dalam Pencitraan Pariwisata Bali”. *Jurnal Kepariwisata Indonesia*, 11(1), 1907 – 9419.

- Nugraha, R., dan Poernomo, S. L. 2021. "Analisis Pandemi Corona Virus Disease 2019 sebagai Alasan Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) Menurut Hukum Perdata di Indonesia". *Journal of Lex Generalis (JLG)*, 2(3).
- Purwahita, dkk. 2021. "Dampak Covid-19 Terhadap Pariwisata Bali Ditinjau Dari Sektor Sosial, Ekonomi, Dan Lingkungan".
- Rasta, I Dewa Made. 2019. "Fungsi Awig-Awig Dalam Mengatur Krama Desa Pakraman Di Bali". *Yustitia*, 12(1).
- Rasuh, D. J. 2016. "Kajian Hukum Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) Menurut Pasal 1244 Dan Pasal 1245 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata". *Lex Privatum*, 4(2).
- Risa, Yulia. 2017 "Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Atas Wanprestasi Debitur Pada Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Hak Tanggungan". *Normative Jurnal Ilmiah Hukum* 5(2).
- Sadiartha, Anak Agung Ngurah Gede. 2017. "Lembaga perkreditan desa sebagai penopang ke-*ajegan* budaya ekonomi masyarakat Bali. "*Jurnal Kajian Bali*, 7(2).
- Sari, Lina Maya, Luluk Musfiroh, and Ambarwati Ambarwati. 2020. "Restrukturisasi Kredit Bank Daerah X Pada Masa Pademi Covid-19." *Jurnal Akuntansi dan Manajemen Mutiara Madani*, 8(1)
- Soritua, Yohanes. 2015. "Analysis Of The Role Of Tourism Sector To Be The Main Income In The Region (A comparation study in the Tourism sector in Bali Province)". *Jurnal Ilmu Manajemen dan Akutansi*, 3 (2).
- Subekti, dalam Erwiningsih, W. 2020. "Elastisitas Pembayaran Pajak Dalam Kondisi *Force Majeure*". *Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan*, 5(02).

- Suhendra, EuphrasiaSusy. 2006. "Peranan Sektor Pariwisata Dalam Pertumbuhan Ekonomi Makro Propinsi Bali Dengan Pendekatan Input-Output". *Jurnal Elektronik11* (1).
- Sujana, I Nyoman dan Putu Ayu Sriasih Wesna. 2020. "Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Desa Adat Kukuh Karangasem Terhadap Dampak Covid-19 Dalam Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada Praktek Lembaga Perkreditan Desa". *Community Services Journal*, 3(1).
- Sukerta, I. Made Rai, I. Nyoman Putu Budiarta, and Desak Gde Dwi Arini. 2021. "Restrukturisasi Kredit terhadap Debitur Akibat Wanprestasi karena Dampak Pandemi Covid-19." *Jurnal Preferensi Hukum*, 2(2).
- Tjoanda, Merry., Yosia Hetharie., Marselo Valentino Geovani Pariela., Ronald Fadly Sopamena. 2021. "Covid-19 sebagai Bentuk Overmacht dan Akibat Hukumnya Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Kredit." *SASI* 27(1).
- Trimurti, Christimulia Purnama. 2013. "Peranan Sektor Pariwisata Dalam Perekonomian Provinsi Bali". *Jurnal Perhotelan dan Pariwisata*, 3 (2).
- Wahyuni, Sri. 2020. "Force Majeure Dan Notoir Feiten Atas Kebijakan PSBB Covid-19". *Jurnal Hukum Sasana*, 6(1).
- Wibawa, P. P. A., dan Artadi, I. K. 2014. "Akibat Hukum Terhadap Debitur atas Terjadinya Force Majeure (Keadaan Memaksa)". *Kerthasemaya Unud*, 1(1).
- Widiastuti, Ni Komang. 2013. "Pengaruh Sektor Pariwisata Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Dan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten/Kota Di Provinsi Bali". *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 2 (5).

Wiguna S, I Gusti Agung Satrya, Desak Gde Dwi Arini, dan Luh Putu Suryani.
“Akibat Hukum Kredit Macet di Lembaga Perkreditan Desa yang
Debiturnya Non Krama”. *Jurnal Analogi Hukum*, 2(1).

Skripsi

Lorent, Olga Tasia. 2021. “Akibat Hukum *Force Majeure* Pada Masa Pandemi
Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dalam Perjanjian Kredit
Perbankan”. Skripsi. Malang: Program Studi Ilmu Hukum. Fakultas
Hukum. Universitas Muhammadiyah Malang.

Internet

Bali Bank News. 2020. “LPD Metra Bangli Terus Berinovasi Menjadi Lebih Baik”.
<https://www.balibanknews.com/read/202011110001/lpd-metra-terus-berinovasi-menjadi-lebih-baik.html> (diakses pada 31 Agustus 2022).

BFI.co.id. 2022. “Kredit Macet : Definisi, Penyebab, dan Cara Mengatasinya”.
<https://www.bfi.co.id/id/blog/kredit-macet-definisi-penyebab-dan-cara-mengatasinya>. (diakses pada 12 Januari 2023).

Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19. (2020). Peta Sebaran.
<https://covid19.go.id/peta-sebaran>. (diakses pada 21 Oktober 2022).

Katadata.com. 2022. Pengertian Nasabah Debitur, Kewajiban, dan Perlindungan
Hukumnya. (diakses pada 24 Oktober 2022).

LP-LPD. 2017. Neraca Lembaga Perkreditan Desa periode 2011 – 2016. Denpasar:
LP-LPD. (diakses pada 22 Oktober 2022).

Prospeku.com. 2021. “Apa itu Kreditur? Pengertian, Jenis dan Bedanya dari
Debitur”. <https://prospeku.com/artikel/apa-itu-kreditur---3850>. (diakses
pada 24 September 2022).

Rofiyandi, Yandi M. 2022. "Pengertian Nasabah Debitur, Kewajiban, dan Perlindungan Hukumnya".

<https://katadata.co.id/redaksi/ekonopedia/62a99804e8ff1/pengertian-nasabah-debitur-kewajiban-dan-perlindungan-hukumnya> (diakses pada 1 September 2022).

Tim detikcom. 2020. Kapan Sebenarnya Corona Pertama Kali Masuk RI?.
detiknews.<https://news.detik.com/berita/d-4991485/kapan-sebenarnya-corona-pertama-kali-masuk-ri> (diakses pada 21 Oktober 2022)

